

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: 20 Desa Dipastikan Belum Bisa Terima Dana Desa
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Cianjur
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.6
Edisi	: Sabtu, 19 Mei 2018

## 20 Desa Dipastikan Belum Bisa Terima Dana Desa

### CIANJUR, (PR).-

Sebanyak 20 dari 354 desa dipastikan belum bisa menerima dana desa tahap pertama. Puluhan desa itu diketahui belum menyelesaikan APBDesa sebagai prasyarat teknis mendapatkan dana desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur telah berkali-kali mengingatkan aparatur desa agar menyelesaikan APBDesa masing-masing karena pencairan dana desa tahap pertama hampir selesai.

"Kami sudah ingatkan agar pemerintah desa segera menyelesaikan prasyarat teknis tersebut. Soalnya, mereka tidak akan mendapat pencairan dana desa di termin selanjutnya. Sebab, laporan pertanggungjawaban termin pertama belum selesai," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Dania, Jumat (18/5/2018).

Ia mengatakan, dinas juga terus memonitoring dan mengevaluasi ke setiap desa. Menurut dia, monitoring itu dilakukan agar tahapan awal pencairan dana setiap desa dapat berjalan sesuai tahapan. Pasalnya, bantuan dana desa yang terbagi dalam tiga termin itu dapat cair jika melalui tahapan yang benar.

Ahmad mengatakan, termin kedua akan cair apabila setiap desa telah menyelesaikan SPJ termin pertama. Namun, jika laporan belum selesai, bantuan termin selanjutnya juga tidak akan bisa dicairkan.

Dikatakan Ahmad, selain persoalan laporan untuk pencairan dana, monev yang dilakukan dinas juga berfokus pada upaya antisipasi terhadap terjadinya kesalahan penggunaan dana desa ke depan.

"Memang diakui, dalam pengelolaan dana desa masih banyak aparatur desa yang diduga tersandung masalah hukum. Makanya, kami berikan arahan dan jika ada yang tidak sesuai, segera diperbaiki," katanya.

Berdasarkan pengalaman selama empat tahun terakhir, setidaknya ada enam aparatur pemerintahan desa yang tersandung masalah hukum. Namun, ia mengaku menghormati proses hukum dan mendukung adanya tindakan yang sesuai jika terbukti telah terjadi penyelewengan.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus memberikan pembinaan bagi seluruh desa, supaya pengelolaan ataupun bantuan lain berjalan sesuai dengan rencana. (Shofira Hanan)\*\*\*